

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar

Criminal Law Enforcement Against The Perpetrators Of Illegal Cosmetics Distribution In Makassar

Lisa Nursyahbani Muhlis^{*1}, Muhadar², Hijriah Adhyanti Mirzana²

*Email: lnmuhlis@gmail.com

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui: 20 April 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif – Empiris yang dilakukan di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Makassar dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjawab bahwa Pertama – tama, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik ilegal yaitu sebagai regulator, melakukan pengawasan sebelum beredar dan setelah beredar, melakukan pembinaan dan melakukan penindakan. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Pasal 197 dan 196 Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Empiris, Penegakan, Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

This study aims to determine the enforcement of criminal law against perpetrators of illegal distribution of cosmetics in Makassar City. This research is a Normative - Empirical Research conducted at the Makassar Food and Drug Supervisory Center and the data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and data collection. The data collected is then analyzed in a qualitative descriptive manner. This research answers that first of all, the role of BPOM in enforcing criminal law on the circulation of illegal cosmetics is as a regulator, conducting supervision before and after circulation, providing guidance and taking action. Second, law enforcement against perpetrators of illegal distribution of cosmetics based on Articles 197 and 196 of the Health Law and the factors that influence it.

Keywords: Empirical, Enforcement, Illegal Cosmetics



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, untuk mendapatkan tampilan yang sempurna seseorang merawat diri dengan berbagai

produk perawatan. Berbagai macam perawatan yang ditawarkan untuk menunjang penampilan seseorang, salah satunya dengan penggunaan kosmetik.

Di era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai

kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi para kaum lelaki. Karena keinginan untuk tampil lebih menarik meningkat membuat permintaan akan kosmetik semakin bertambah. Konsumen menginginkan kosmetik yang murah dan mempunyai reaksi yang cepat untuk merubah penampilan mereka. Peluang tersebut membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Konsumen kemudian menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha tersebut yang berprinsip untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian Kosmetik adalah bahan atau yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik cenderung meningkat, hal tersebut sejalan dengan data dari kementerian perindustrian bahwa Industri kosmetik nasional di tahun 2018 mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Industri kosmetik dalam negeri sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan atau dengan kata lain mengalami peningkatan 25%.

Peningkatan akan konsumsi produk kosmetik sejalan dengan penggunaan teknologi yang penggunaannya sebagian besar digunakan dalam bidang perdagangan. Teknologi berbasis jaringan Internet mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudahan melakukan pembelian melalui jaringan Internet dengan menggunakan telepon seluler, komputer dan Alat komunikasi lainnya dengan menggunakan aplikasi jual beli secara Daring/*online*.

Kemudahan mengakses untuk membeli produk kosmetik mengakibatkan beragam produk kosmetik bermunculan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini membuat peluang bagi pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik yang tidak memiliki notifikasi dari

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui transaksi *online*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan Makanan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum, Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaa, penyimpanan, penjualan obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan agar memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki Izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Untuk peredaran kosmetik yang di produksi di wilayah Indonesia maupun kosmetik impor yang diedarkan di wilayah Indonesia

diwajibkan untuk memiliki Notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM.

Meskipun telah diatur demikian, namun pelanggaran atas ketentuan izin edar ini tetap terjadi. Hal ini dibuktikan dengan kasus Tindak Pidana Peredaran kosmetik illegal dari tahun 2018-2020 dengan jumlah 37 kasus. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum pidana atas pencedaran kosmetika illegal di Kota Makassar

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk Penelitian Hukum Normatif - Empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi penerapannya pada peristiwa hukum dan ketentuan – ketentuan perundang – undangan . Penelitian ini mengetahui peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik illegal dan Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal di Kota Makassar.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu BPOM Makassar melalui hasil dari wawancara dengan staf bidang pengawasan dan penindakan BBPOM Makassar, sedangkan Data sekunder bersumber dari literatur atau bahan Pustaka, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan.

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik melalui pertanyaan dan studi dokumentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan peredaran obat dan makanan terkhusus dibidang kosmetik di kota Makassar merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar (BPOM Makassar) untuk bagian bidang penindakan. Revolusi industry 4.0 memberikan dampak terhadap terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk obat dan makanan terkhusus kosmetik. Kemudahan akan akses untuk mendapatkan berbagai macam kosmetik sehingga daya beli dan konsumsi akan kosmetik mengalami peningkatan di Kota Makassar hal tersebut memerlukan perhatian khusus dalam pengawasannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada sarana distribusi maupun toko kosmetik di Kota Makassar. Berikut Peranan BPOM dalam penegakan Hukum Pidana Atas Peredaran kosmetik Ilegal:

a. Regulator (pengatur)

Untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman terkhusus kosmetik yang beredar

di masyarakat perlu didukung penguatan kelembagaan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan amanat Perpres No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan obat dan makanan terkhusus kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan telah dituangkan melalui Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika bahwa setiap kosmetika yang beredar berkewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, untuk bahan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam kosmetik juga diatur jelas didalam peraturan kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang persyaratan Teknis Kosmetika dan terhadap pengajuan notifikasi kosmetik diatur dalam Perka BPOM No. HK.03.1.123.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Setiap kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki izin edar berupa notifikasi

kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM. Apabila kosmetik yang beredar tidak memiliki izin edar maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan. Terhadap produk kosmetik yang diproduksi sendiri baik itu industri skala rumahan maupun skala besar memiliki harus memiliki orang yang memiliki kewenangan terhadapnya.

b. Pengawasan

Salah satu tugas dari BPOM Makassar adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan merupakan bagian terpenting untuk mengetahui produk yang beredar di masyarakat aman dan terjamin mutunya. Sistem pengawasan kosmetik yang dilaksanakan oleh BBPOM Makassar tujuannya untuk mencegah produk kosmetik ilegal yaitu kosmetik yang tidak memiliki izin edar, klaim yang berlebihan, kemasan yang telah rusak ataupun produk yang telah kedaluwarsa dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pada hakekatnya kekuasaan pengawasan dalam pembuatan dan perdagangan kosmetika adalah mengendalikan keberadaan kosmetika yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara optimal jika melibatkan peran serta masyarakat baik selaku pasien, organisasi profesi maupun

sebagai pelaku usaha, hal ini sangat penting untuk menciptakan kenyamanan berusaha dan terpenuhinya hak-hak serta kepentingan kedua belah pihak.

1) Pengawasan sebelum beredar (*Pre Market*)

Pengawasan sebelum produk kosmetik beredar merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian terhadap produk kosmetik untuk mendapatkan izin edar berupa notifikasi. Terdiri dari 3 kegiatan yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan standar. Penyusunan dan penetapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang kemudian di laksanakan oleh BPOM Makassar yang berisikan syarat-syarat kosmetik yang memenuhi keamanan, mutu dan khasiat produk. Yang kedua yaitu penilaian produk sebelum beredar. Penilaian produk sebelum beredar dilakukan dengan melakukan uji laboratorium terhadap produk yang ingin didaftarkan yaitu kosmetik tidak mengandung bahan berbahaya yang diatur dalam Perka BPOM No. 18 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik yang berisi bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan, bahan

pewarna, pengawet dan UV filters dan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Yang ketiga yaitu Sertifikasi sarana produksi kosmetik. Sertifikasi sarana produksi kosmetik dilakukan untuk mengetahui cara pembuatan kosmetik sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang mengaturnya.

Terhadap produk kosmetik yang berasal dari luar negeri dan telah mendapatkan izin edar dari negara asalnya berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia bahwa produk tersebut harus mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Apabila produk dari luar negeri tersebut telah mendapatkan izin edar dari negara asalnya akan tetapi tidak melakukan pendaftaran izin edar di BPOM maka produk tersebut dikategorikan kosmetik illegal.

2) Pengawasan setelah beredar (*Post Market*)

Pengawasan produk setelah beredar merupakan upaya yang dilakukan BPOM untuk mengawasi apakah produk yang beredar di masyarakat sudah sesuai baik itu keamanan, kemanfaatan dan mutu produk pada saat didaftarkan dan pada saat

diedarkan. Persyaratan keamanan yaitu kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Perka BPOM tentang kosmetik. Persyaratan kemanfaatan yaitu klaim kemanfaatan yang dicantumkan pada penandaan kosmetik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan mutu yaitu harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan mutu sebagaimana tercantum dalam kodeks kosmetika Indonesia, standar yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan setelah beredar berupa pembelian produk kosmetik secara acak yang kemudian akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan informasi pada kemasan maupun iklan dari kosmetik dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik apakah telah sesuai dengan cara distribusi kosmetik yang baik untuk menjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu produk yang telah beredar.

Pengawasan kosmetik oleh BPOM Makassar dilakukan melalui pemeriksaan secara rutin terhadap sarana distribusi

kosmetik yang dilaksanakan setiap bulannya berdasarkan analisis resiko yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang dimana ketika ada temuan kosmetik yang tidak memiliki izin edar disarana tersebut maka akan menjadi prioritas di dipemeriksaan selanjutnya sedangkan untuk sarana baru maka akan menjadi prioritas pemeriksaan.

Tabel 1. Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik Yang Diawasi Oleh BPOM Makassar

No	Tahun	Jumlah Sarana distribusi	MK	TMK
1	2018	249	121	173
2	2019	290	176	128
3	2020	827	155	107

Sumber: Bagian Pemeriksaan BBPOM Makassar

Berdasarkan tabel diatas sarana kosmetik berupa toko kosmetik, salon, pasar tradisional, klinik kecantikan ataupun store di Mall-Mall. Untuk sarana memenuhi Ketentuan(MK) yang berarti sarana tersebut telah memenuhi unsur cara distribusi kosmetik yang baik dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan kosmetik tanpa izin edar. Sedangkan untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang berarti didalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran administrasi ataupun terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Untuk sarana yang TMK dilakukan pembinaan terhadap sarana , peringatan tertulis, peringatan keras dan pemusnahan kosmetik.

Pengawasan setelah beredar berupa pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) dilakukan setiap bulan oleh petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun diawal tahun dimana untuk setiap bulan telah ditentukan kategori dan jumlah kosmetik yang akan di *sampling* yang selanjutnya akan dimasukkan ke bidang laboratorium untuk diuji.

c. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh BPOM Makassar, pembinaan dilakukan kepada pelaku usaha ataupun konsumen yang merupakan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Pembinaan dalam bentuk sosialisasi berupa Komunikasi, Informasi dan edukasi dilakukan sebagai upaya untuk mencerdaskan konsumen maupun pelaku usaha dalam memilah kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Komunikasi, Informasi dan edukasi dilakukan setiap tahunnya terkait dengan konsumen cerdas memilih kosmetik oleh BBPOM Makassar, dilakukan kepada ibu rumah tangga, anak sekolah maupun pelaku usaha.

Adapun pembinaan juga dilakukan terhadap pelaku usaha tentang bagaimana cara distribusi kosmetik yang baik maupun bagaimana cara produksi kosmetik yang

baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penindakan

Selain melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan salah satu tugas dan fungsi BPOM berdasarkan perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam hal proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM yang memiliki kewenangan dalam penyidikan terhadap adanya pelanggaran pidana baik berupa pengadaan, penyimpanan, penjualan obat, obat tradisional, pangan dan kosmetik. Penindakan dilakukan atas laporan atau pengaduan oleh masyarakat.

Penindakan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar diawali dengan adanya laporan/pengaduan masyarakat yang diterima yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan informasi terkait laporan tersebut. Apabila informasi telah cukup dan memang terdapat unsur tindak pidana didalamnya maka dilakukanlah penindakan oleh BBPOM Makassar Bersama dengan korwas PPNS yang kemudian dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana kosmetik ilegal. Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kosmetik

dilakukan oleh PPNS BPOM Makassar yang berada di bawah pengawasan korwas POLDA SulSel. Apabila berkas penyidikan telah selesai akan diserahkan kepada JPU melalui korwas POLDA SulSel.

e. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar

Bisnis kosmetik saat ini menjadi salah satu lahan yang menggiurkan bagi banyak orang. Tingginya *demand* akan kosmetik membuat menjamurnya penjaja kosmetik di hampir semua *platform e-commerce*. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mengubah pola belanja masyarakat dari *offline* bergeser ke *online*. Data Badan Pusat Statistik selama 7 bulan pandemi mencatat peningkatan 480% transaksi *online/daring*. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum *seller di e-commerce* untuk memasarkan produk kosmetik tanpa izin edar (TIE)/ ilegal dan mengandung bahan berbahaya di berbagai *marketplace*.

Maraknya penjualan kosmetik ilegal di Indonesia khususnya untuk wilayah Kota Makassar dikarenakan harga yang lebih murah dan hasil yang lebih cepat jika dibandingkan dengan produk legal. Konsumen tentunya sebagai orang pertama yang akan merasakan dampak dari produk kosmetik ilegal. Untuk itu penanganan terhadap penyebaran kosmetik ilegal yang

diperjual belikan secara bebas perlu mejadi perhatian agar tidak banyak lagi konsumen yang terkena dampak negatifnya. Kedudukan konsumen sekarang ini masih sangat lemah dari pada kedudukan produsen, sehingga sangat diperlukan agar kedudukan konsumen tidak selalu berada pada pihak yang dirugikan, dnegan demikian dapat dilakukan melalui penerapan hukum yang sesuai.

Menurut soerjono soekanto, factor yang berpengaruh besar dalam ditegakkannya suatu aturan adalah factor penegak hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang disusun oleh penegak hukum dan masyarakat menganggap penegak hukum sebagai panutan hukumnya.

Badan POM berfungsi menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, Badan POM memiliki tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidangan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, Badan POM memiliki beberapa fungsi antara lain melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik seperti toko kosmetik, swalayan, klinik dan dan lain-lain yang telah memiliki izin serta menyelenggarakan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan pengawasan post-market sebagai upaya hilir pengawasan obat dan makanan juga mencakup kegiatan *law enforcement* (kegiatan bidang penyidikan dan penindakan) sebagai salah satu upaya untuk memberikan dampak bermakna tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan khususnya di bidang kosmetik illegal antara lain, berupa pemberian efek jera pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Adapun data kasus peredaran kosmetik illegal di kota makassar yang diperoleh penulis, sebagai berikut.

Tabel 2. Data Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	21
2	2019	22
3	2020	7
Total		50

Sumber Data : Data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar olahan 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa kasus kosmetik illegal yang terjadi di kota Makassar dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif. Dari kasus kosmetik illegal didominasi oleh produk kosmetik illegal impor yaitu 65 persen dan produk domestik 35 persen. Hal ini sebagai pemicu banyaknya kosmetik-

kosmetik palsu yang beredar di masyarakat. Sementara kosmetik yang beredar diwajibkan untuk memiliki izin edar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII /201 (Permenkes Notifikasi Kosmetika) menentukan bahwa kosmetika setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena produk yang memiliki izin edar telah dijamin kualitas produk tersebut dengan proses sertifikasi dan hasil uji oleh BPOM bahwa produk tersebut layak untuk diedarkan. Akan tetapi apabila produk tersebut tidak memiliki izin edar akan ada dampak yang dirasakan oleh konsumen seperti alergi, iritasi dan bentol-bentol.

Pada kasus kosmetik *illegal*, zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetika diantaranya merkuri, rhodamin b, hidrokinon dan asam retinoate. Rhodamin B sering disalahgunakan pada kosmetik sediaan tata rias (eye shadow, lipstik), rhodamin b merupakan pewarna kertas, tinta dan tekstil, pewarna ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan bersifat karsinogenik. Hidrokinon banyak disalahgunakan pada produk pencerah kulit, penggunaan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit dan

hiperpigmentasi. Asam retinoat biasanya ditemukan pada kosmetik untuk *peeling* (pengelupas kulit), penggunaan asam retinoat dapat menyebabkan rasa terbakar pada kulit dan bersifat teratogenik. Merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, gagal ginjal, gangguan pada janin dan kanker.

Dampak yang timbul akibat menggunakan kosmetik illegal sangatlah merugikan penggunaannya, di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (a) tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan.

Hal tersebut untuk menjamin konsumen dari pelaku usaha nakal serta agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkan. Tapi dalam kenyataannya banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang diproduksi oleh mereka, misalnya dengan mencantumkan nomor izin edar palsu dan informasi menyesatkan tentang produk

mereka seperti dapat memutihkan hanya dalam 3 (tiga) hari.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Frasa penegakan hukum mempunyai konotasi menegaka, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Permasalahan pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang, 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana

hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kota Makassar merupakan ibu kota untuk provinsi Sulawesi selatan sehingga banyaknya pusat distribusi kosmetik di wilayah kota Makassar. Hal tersebut merupakan salah satu alasan banyaknya ditemukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dengan klaim kosmetik yang berlebihan misalnya dapat memutihkan dalam 3 hari dan dapat dilihat hasilnya dalam sekali pakai, selain itu harga yang terjangkau dibandingkan dengan produk kosmetik yang mempunyai izin edar dimana konsumen dalam hal ini pembeli tidak menyadari akan bahaya kandungan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan di wilayah kerja BPOM Makassar mengarahkan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) BPOM Makassar sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan serta keterangan tindak pidana dibidang kesehatan..

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, PPNS BPOM Makassar memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana dibidang kesehatan. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM Makassar membantu tugas dari kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan, terkhusus dalam penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik illegal.

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukna penyidikan menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang. Ruang lingkup penyidikan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah;

- a. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang;
- b. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmeti tanpa izn edar;
- c. Memproduksi kosmetik tanpa keahlian dan kewenangan;

Dikaitkan dengan teori Sistem Peradilan Pidana, PPNS BBPOM berwenang melakukan Penyidik dan

penyelidikan dalam lingkup tertentu. Keberadaan Penyidik PNS adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh Penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Penyidik PNS.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM Makassar dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal antara lain:

1. PPNS BPOM Makassar mendapatkan informasi terkait peredaran kosmetik ilegal yang diperoleh dari laporan masyarakat, Pengaduan melalui unit layanan Pengaduan Konsumen BBPOM Makassar, Lintas sektor seperti TNI/Polri, kementerian atau Lembaga lain terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu BBPOM Makassar juga melakukan pengawasan secara daring terkait dengan produk-produk kosmetik yang diperjual belikan secara *daring* baik itu di *marketplace* maupun akun-akun media sosial lainnya. Laporan menurut Pasal 1 ayat (24) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : “

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa.”

Laporan yang bersumber dari masyarakat, Lintas sektor dan Pengawasan Intern oleh BPOM dimana pelapor melihat langsung atau menduga telah terjadi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilaporkan kepada BBPOM Makassar.

2. Penyelidikan dapat dilakukan melalui investigasi awal dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mencari bukti awal terkait tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar yang terjadi, Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tidak jauh jauh berbeda dengan penyelidikan pada umumnya dimana setelah terdapat cukup bukti dari investigasi langsung maka berdasarkan surat tugas yang dimiliki maka penyidikan dapat segera dilakukan. PPNS BPOM Makassar terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil investigasi awal dilapangan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang

digunakan yang ternyata dan diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Yang kemudian sitaan dibawa dan disimpan digedung penyimpanan barang bukti di kantor PPNS BPOM Makassar.

3. Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 KUHP menyatakan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Penangkapan tersangka dilakukan oleh penyidik kepolisian selaku koordinasi pengawas dari PPNS BPOM Makassar.

Tabel 3. Kasus Projusticia dan Non-Projusticia Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Projusticia	Non-Projusticia
1	2018	14 kasus	8 kasus	6 kasus
2	2019	16 kasus	8 kasus	8 kasus
3	2020	7 kasus	5 kasus	2 kasus
Total		37 Kasus	21 kasus	16 kasus

Sumber Data : Data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar olahan 2021

Dari total kasus yang ditangani PPNS BPOM Makassar hanya 56% yang projusticia sedangkan 44% nonprojusticia. Beberapa kasus non-projusticia dikarenakan alat bukti yang belum cukup ataupun belum pernah dilakukan pembinaan

untuk tindak lanjutnya dilakukan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen kesehatan dan kosmetika yaitu dengan pemberian peringatan tertulis kepada pemilik sarana. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus dikarenakan covid-19 sehingga beberapa kegiatan penindakan di BBPOM Makassar tidak terlaksana dikarenakan kebijakan pemerintah yaitu *Lockdown*.

Peningkatan kasus peredaran kosmetik illegal di kota makassar dikarenakan permintaan yang tinggi dari konsumen dan banyaknya iklan-iklan yang menyesatkan sehingga membuat konsumen sangat mudah untuk mendapatkannya. Berikut daftar kosmetik illegal yang diamankan BBPOM Makassar, sebagai berikut:

Tabel 4. Data Daftar Nama Produk Kosmetik Ilegal

No.	Nama Produk Kosmetik
1	Joefie Organic Face Mask Cofee
2	Carrian Snail White
3	Day by Day Face Mask Green Tea Clay
4	Horec Nature Skin Care Mask Honey
5	Bioaqua Collagen Nourish Lips Membrane
6	Beotua Skin Mask Blueberry
7	Innisfree My Real Squeese Mask Tea Tree
8	Dosting Barbie Handbody
9	Milk Facial Mask
10	Images Hand Cream
11	Lameila 12 Color Eyeshadow

12	Anylady Eyeshadow/Lipstick/blusher /eyebrow powder
13	Mixiu Scrub Cream
14	Eau de Zwitsal baby
15	Cinderella EyeShadow
16	Yuja Niacin Sleeping Mask
17	Otwoo Fiber Mascara
18	Gelatin Peel of Face Mask
19	O.Two.o Black Gold Select Cover Up
20	Supreme Moisture Heel Balm
21	Collagen CV Mega Anugrah
22	Scentio Whitening Q10 Soap
23	24K Goldzan
24	King of Ginger 7Days Hair Nutrient Solution
25	Wink White Soap
26	Hong Liao Babe Skin Cream
27	Rorec Replenishment Moist Yogurt Mask
28	Images Seaweed Moisturizing Hydrating Mask
29	Goat Milk Facial Mask
30	KFS Bibit Collagen
31	Bibit Collagen Body Lotion
32	Sexy Soon Breast Cream
33	Sivana Colors Cactus Protection
34	Pasjel Body Cream
35	Alpha Arbutin 3 plus +
36	O Two O Rose Gold Powder
37	Mixiu Scrub Cream
38	Ginger Foot Mask
39	Renewal Baby Foot Muby
40	R&F Pink Glowing Bleaching White
41	Paket Kosmetik Syahreni
42	Beotua Colorful Strawberry Fresh Mask
43	Bioaqua V7 Deep hydration (Jeruk)
44	Bioaqua Rose Moisturizing Mask
45	Bioaqua V7 Toning Youth Mask
46	KFS Injeksi Whitening
47	Feb Glow Skin Care KFS
48	KFS Susu Pemutih
49	Putri Hair Tonic
50	Balibloom Massage Oil

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya produk kosmetik illegal yang beredar di Kota Makassar. Produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar ataupun produk tersebut dipalsukan oleh pelaku usaha. Produk kosmetik illegal

banyak ditemukan beredar dikarenakan masih lemahnya regulasi terkait dengan peredaran kosmetik ilegal menurut Faisal selaku staf bidnag penindakan mengatakan belum adanya aturan khusus yang mengatur obat dan makanan termasuk didalamnya kosmetik sehingga masih menggunakan Undang-undang kesehatan.

Selain itu sanksi yang diberikan masih terlalu ringan kepada pelaku usaha yang melakukan peredaran kosmetik ilegal sehingga tidak ada efek jera dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan padahal dampak yang disebabkan oleh kosmetik ilegal sangat banyak. Untuk sanksi dalam Pasal 197 UU Kesehatan tidak menyebutkan minimal hukuman pidananya akan tetapi hanya menyebutkan maksimal dari hukuman yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga hakim menjatuhkan dibawah angka tersebut. Sebagaimana dalam:

1. Analisis putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN Mks

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada kasus ini merupakan kasus pelaku usaha dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal

196 UU Kesehatan dengan terdakwa Imelda.

Sebagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Padahal sudah sangat jelas dalam keterangan saksi penuntut umum dan keterangan saksi terdakwa bahwa cream yang diperjual belikan tidak memiliki izin edar dalam pengakuannya masih dalam pengurusan izin edar padahal faktanya tidak ada pengurusan izin edar di BBPOM Makassar dengan kata lain bahwa sebenarnya terdakwa telah mengetahui bahwa cream yang tidak memiliki izin edar dilarang untuk diperjual belikan.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa proses pembuatan cream dengan mencampurkan beberapa bahan baku dengan menggunakan *mixer* dan takaran yang tidak jelas. Hal

tersebut sangat membahayakan karena tidak memenuhi standar sanitasi kebersihan dan dapat terjadi kontaminasi dikarenakan bahan maupun alat tidak dijamin kebersihannya.

Hal tersebut berdampak besar terhadap konsumennya. Sementara untuk denda yang diberikan sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa menurut penulis tidak sebanding dengan kerugian materil yang akan didapatkan oleh konsumen. Sudah sangat jelas disebutkan didalam Pasal 196 UU Kesehatan, pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah). Terdakwa mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya (raksa) yang dapat merusak Kesehatan konsumennya.

2. Analisis Putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks dan Putusan No. 978/Pid.Sus/ 2020/PN Mks

Hasil dari analisis penulis terhadap putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks merupakan kasus pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan izin edar dalam hal ini pelaku mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu raksa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU Kesehatan dengan terdakwa Sulastri Saharullah. Majelis hakim menyatakan bahwa

perbuatan tersebut secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Jika dibandingkan dengan putusan No. 978/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama terdakwa Yolinda Darwin Panoni yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya raksa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 40 (Empat puluh) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan

Berdasarkan analisis penulis terhadap 2 putusan tersebut dimana Pasal yang diberikan kepada terdakwa yaitu Pasal 197 UU Kesehatan yang dimana unsurnya telah terpenuhi, akan tetapi jika kita lihat putusan yang diberikan oleh majelis hakim sangat jauh bereda. Jika dilihat dari hal yang

meringankan kedua terdakwa sama saja yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar sangat berbahaya bagi konsumen, hal tersebut tidak sebanding dengan putusan yang hanya 9 (Sembilan) bulan dan bahkan 40 (empat puluh) hari saja, untuk denda tidak seberapa yaitu 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bahkan hanya 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut penulis hal tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku karena jika kita lihat Pasal yang diberikan yaitu Pasal 197 UU Kesehatan yang dimana pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan analisis putusan diatas jika dikaitkan dengan teori Soerjono soekanto bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.

Kurangnya dukungan peraturan perundnag-undngan yang mengatur secara jelas terkait dengan peredaran kosmetik illegal. Hal tersebut disampaikan oleh Faisal yaitu pegawai BBPOM Makassar dibidang penindakan bahwa kendala utama yang

dialami oleh PPNS adalah tidak adanya aturan yang jelas atau terkhusus untuk Obat dan Makanan dalam hal ini kosmetik sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Kendala terhadap penegakan hukum yakni masih berhubungan dengan faktor hukumnya yaitu perundang-undangan yang masih minim sehingga kewenangan terhadap BPOM dalam menegakkan hukum masih belum maksimal.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tidak dipungkiri hal yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sarana dan fasilitas penegakan hukum, untuk BBPOM Makassar masih kekurangan sumber daya manusia jika kita lihat dari hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan dengan cakupan luas wilayah pengawasan.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat akan kosmetik illegal masih sangat kurang dikarenakan dampak yang dirasakan belum dialami. Dampak terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan berbahaya bisa saja tidak langsung dirasakan

oleh konsumen akan tetapi berdampak jangka Panjang terhadap konsumen baik itu dari penyakit kulit maupun pemicu oenyakit lainnya seperti kanker.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nllai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Seringnya terjadi intervensi dari pelaku usaha ataupun keluarganya atau pihak lain yang meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan ke tahap pro Justitia

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik illegal yaitu (1) sebagai regulator (pengatur) yang bertugas membuat aturan mengenai peredaran obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar diwilayah Indonesia. Pengawasan, sistem pengawasan terdiri dari dua yaitu (a) pengawasan sebelum beredar (*Pre-Market*) yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik sebelum beredar. (b) Pengawasan

setelah beredar (*Post Market*) yaitu pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dan melakuka pemeriksaan sarana distribusi kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, (2011), Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, PT. raja grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, (2004), *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*, PT Rajawali Pers. Jakarta.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, (2007), *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Kemenperin.go.id (2018, Maret 20), Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%, from <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>
- Peraturan (2019 Oktober 22), Penjelasan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, from https://jdih.pom.go.id/download/file/1223/Perka_BPOM_2019.pdf
- Peraturan. (2017 Agustus 9), Penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, from <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%20Nomor%2080%20Tahun%202017.pdf>
- Pom.go.id (2015, Mei 5), Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, from <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-Kosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>
- Pom.go.id (2021, September 1), Badan POM Ungkap Peredaran Lebih dari 10 Miliar

- Rupiah Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat, from <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>
- Putusan Pengadilan Negeri, No. 266/Pid.Sus/2019/PN Mks (Pengadilan Negeri April Senin, 2019).
- Putusan Pengadilan Negeri, No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks (Pengadilan Negeri Juli Senin, 2019).
- Retno Iswari dan Fatma Latifah, (2007), *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy, (2013), Pengawasan peredaran Obat tradisional singkawang, *Jurnal penelitian Hukum*, Vo, 2,4 No. 2.
- Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy. 2013. "Pengawasan peredaran Obat tradisional singkawang". *Jurnal penelitian Hukum*, Vo, 2,4 No. 2
- Soerjono Soekanto, (1993), *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumiaty Haslinda, (2003), *Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung*, Jakarta.
- Undang-Undang. (1999 April 20), Penjelasan atas Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bagian ke I umum.
- Wawancara (2021 Oktober 14), Berdasarkan Wawancara dengan Muhammad Faisal, S.Farm., SH.,Apt.,M.H, PPNS BPOM Makassar.
- Wawancara (2021 Oktober 29) Berdasarkan dengan Handri Burhan Staf Bidang Pemeriksaan.